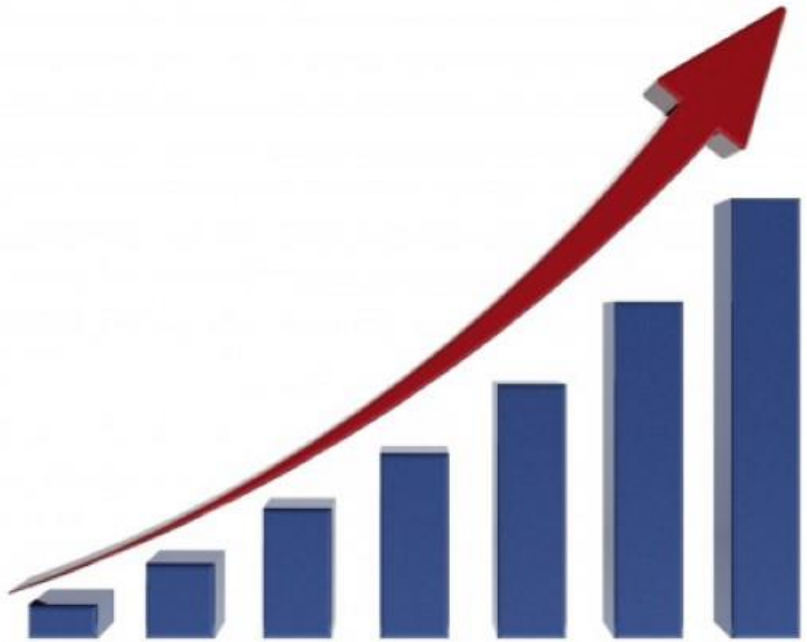
PENERIMAAN PAJAK: TANTANGAN & OUTLOOK

disampaikan oleh
YON ARSAL
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

KAPj IAI *Goes to Campus*
Jakarta, 28 Januari 2019



Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018

djp

Penerimaan Tahun 2018: Realisasi penerimaan pajak s.d. 31 Desember 2018 diperkirakan sebesar **Rp 1.315,9 T**, tumbuh **14,33%** dengan pencapaian **92,41%** dari APBN 2018.

(target dan realisasi dalam trilyun Rp)

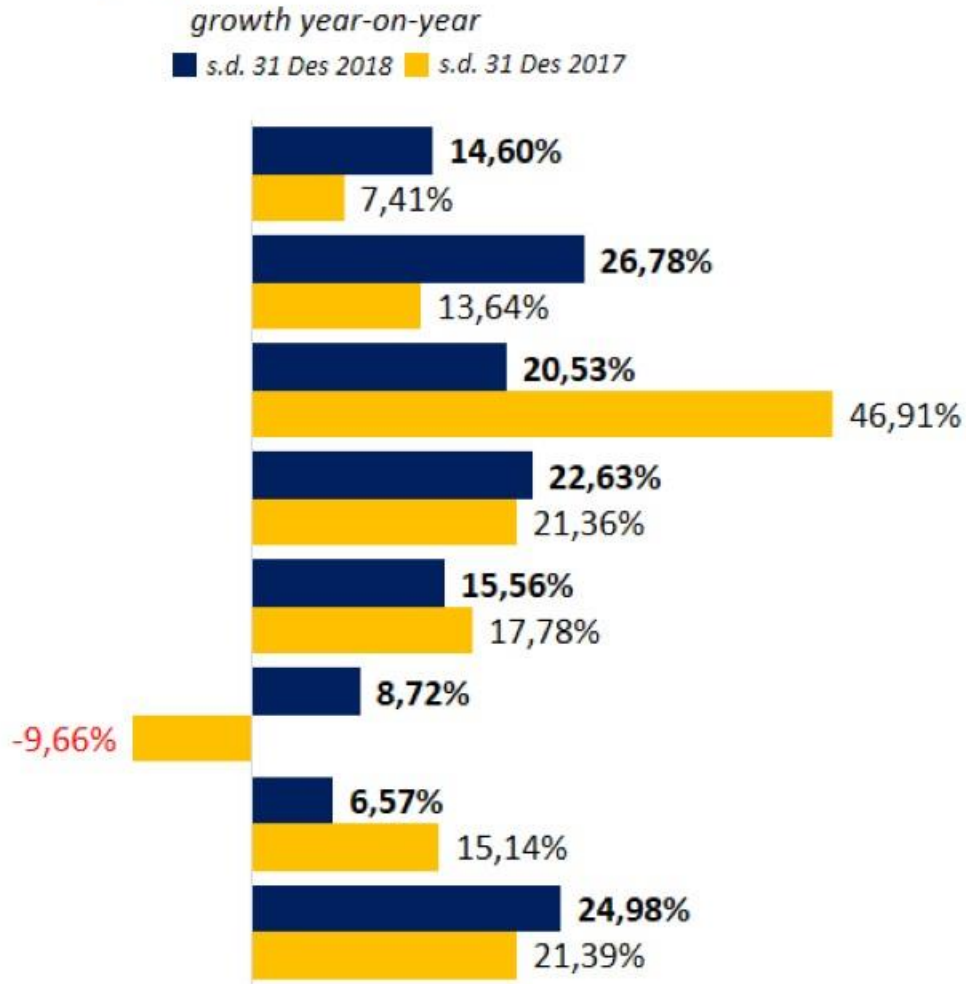
No	Jenis Pajak	APBN 2018	Realisasi s.d. 31 Des		% growth 2017	% growth 2018	% Capaian 2018
			2017	2018			
A	PPh Non Migas	817,0	596,5	686,8	-5,34%	15,14%	84,06%
	- non TA		584,4	686,8	11,22%	17,51%	
B	PPN & PPnBM	541,8	480,7	538,2	16,62%	11,96%	99,34%
C	PBB	17,4	16,8	19,4	-13,74%	15,93%	111,94%
D	Pajak Lainnya	9,7	6,7	6,8	-16,86%	0,85%	70,12%
E	PPh Migas	38,1	50,3	64,7	39,38%	28,57%	169,64%
Total Penerimaan DJP		**1.424,0**	**1.151,0**	**1.315,9**	**4,07%**	**14,33%**	**92,41%**
- non TA			**1.139,0**	**1.315,9**	**13,75%**	**15,53%**	
Penerimaan DJP Non Migas		**1.385,9**	**1.100,7**	**1.251,2**	**2,88%**	**13,68%**	
- non TA			**1.088,7**	**1.251,2**	**12,79%**	**14,93%**	

djp

”Apabila tidak memperhitungkan penerimaan dari uang tebusan TA Januari – Maret 2017 maka pertumbuhan tahun 2018 mencapai 15,53%”

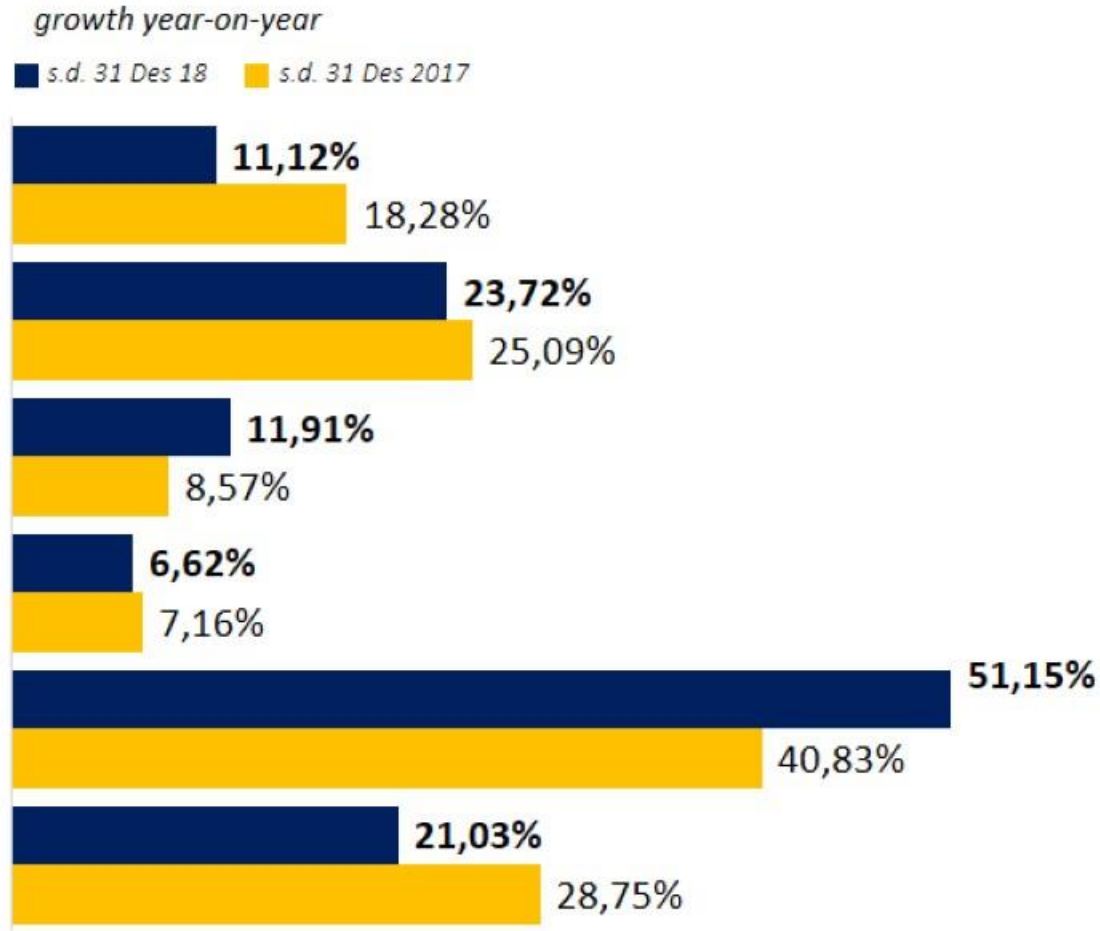
Penerimaan Tahun 2018: Secara umum jenis pajak utama tumbuh positif seperti **PPh Pasal 21 (tumbuh 14,60%)**, **PPh Badan (22,63%)**, dan **PPN DN (6,57%)**.

jenis pajak	*Realisasi s.d. 31 Des 2018*
PPh 21	Rp 134,96 T
PPh 22 Impor	Rp 54,71 T
PPh OP	Rp 9,41 T
PPh Badan	Rp 255,37 T
PPh 26	Rp 58,85 T
PPh Final	Rp 115,58 T
PPN DN	Rp 334,21 T
PPN Impor	Rp 186,26 T



Perkembangan Penerimaan Sektoral: Beberapa sektor utama tumbuh ***double digits*** seperti **Industri Pengolahan (11,12%), Perdagangan (23,72%)** dan **Jasa Keuangan (11,91%)**.

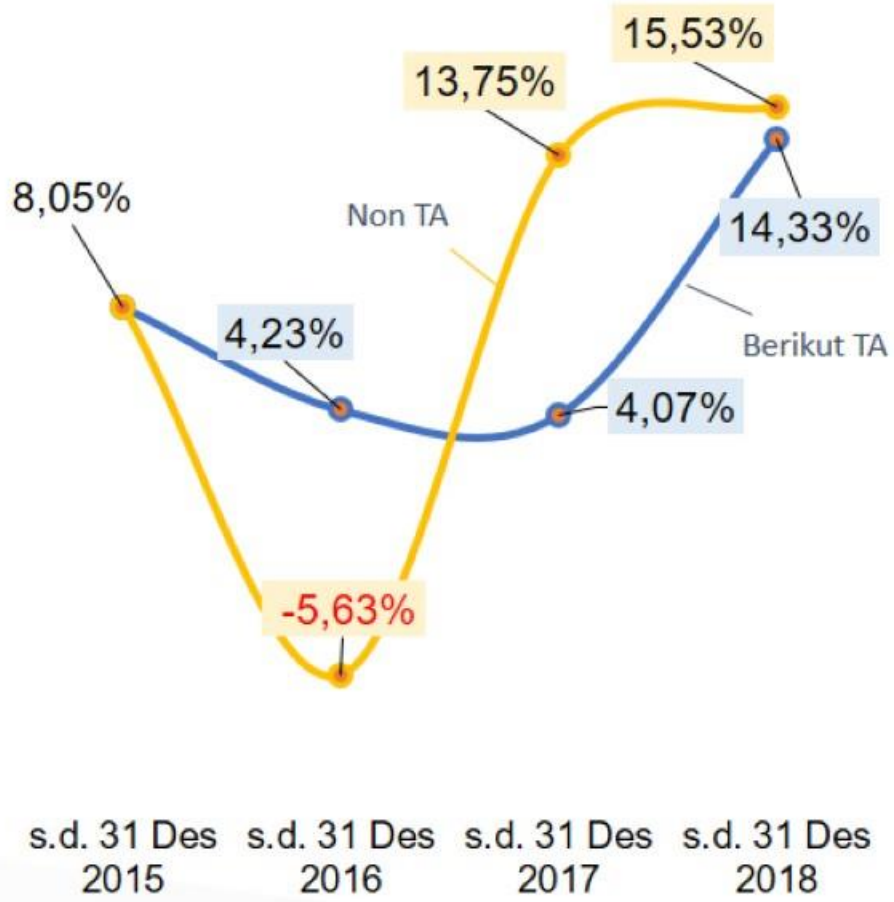
sektor usaha	*realisasi penerimaan pajak & kontribusi s.d. 31 Des 2018*
Industri Pengolahan	**Rp 363,60T**
	30,0%
Perdagangan	Rp **234,46T**
	19,3%
Jasa Keuangan & Asuransi	Rp **162,15T**
	13,4%
Konstruksi & Real Estat	Rp **83,51T**
	6,9%
Pertambangan	Rp **80,55T**
	6,6%
Pertanian	Rp **20,69T**
	1,7%



djp

**Pertumbuhan di luar uang tebusan amnesti pajak, PPh migas, PPh DTP, PBB, PPh Final Revaluasi*

Perkembangan Pertumbuhan ***y-o-y*** **Akumulatif**: Secara umum tren **pertumbuhan penerimaan pajak masih positif**, melanjutkan tren di periode sebelumnya



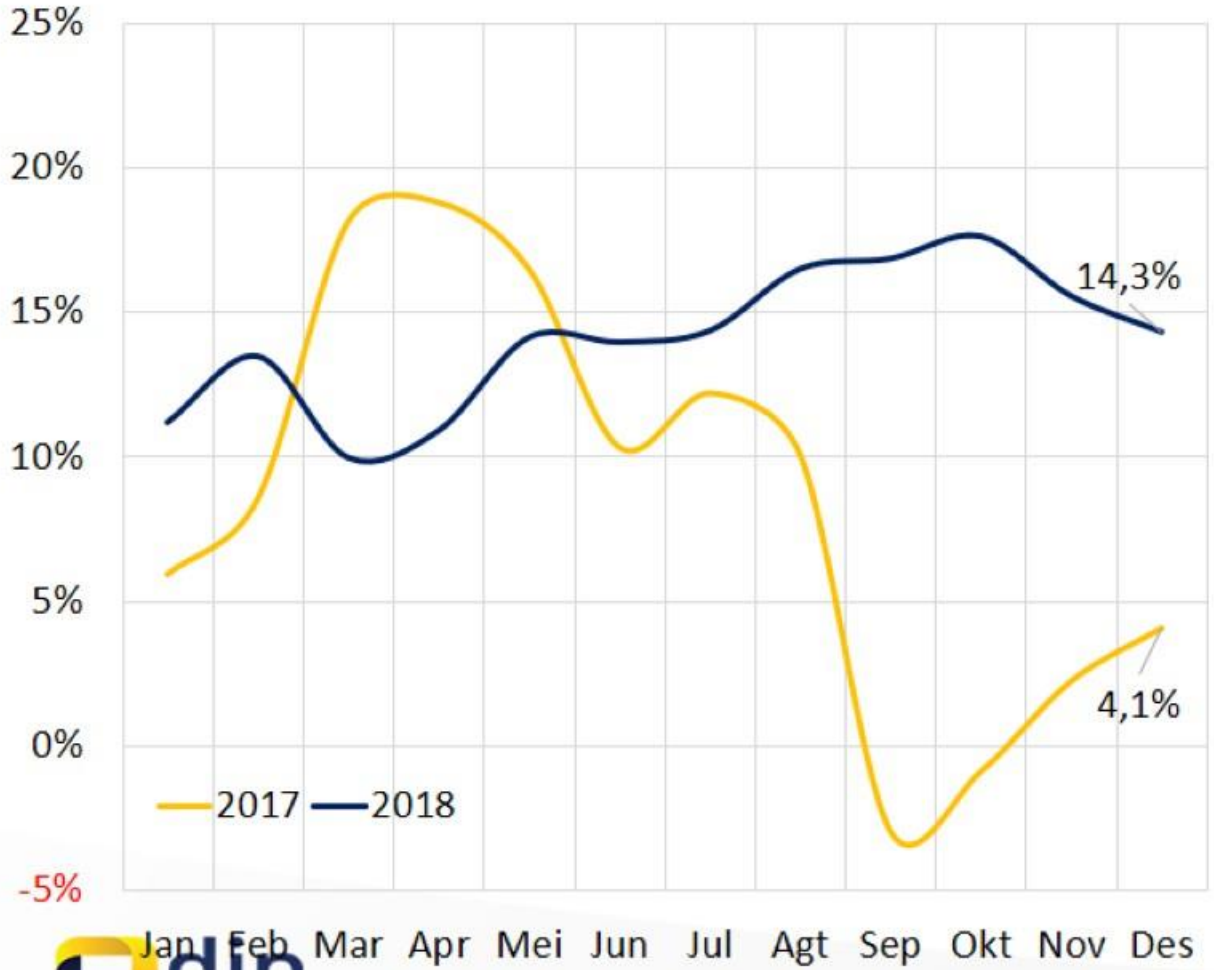
Pertumbuhan periode sebelumnya:

- Pertumbuhan y-o-y Jan - Nov
  - → 2018 = 15,35%
  - → 2017 = 2,57%
- Pertumbuhan y-o-y Jan - Nov (non TA)
  - → 2018 = 16,78%
  - → 2017 = 12,67%

djp

Perkembangan Pertumbuhan *y-o-y* Akumulatif: Arah pertumbuhan penerimaan di tahun 2018 menunjukkan **tren yang lebih baik** jika dibandingkan tahun 2017 (tahun 2017 tren pertumbuhan melambat di semester II)

PERTUMBUHAN AKUMULATIF (TOTAL)



PERTUMBUHAN AKUMULATIF (NON TA)



djp



Gambaran Target DJP di Tahun 2019

djp

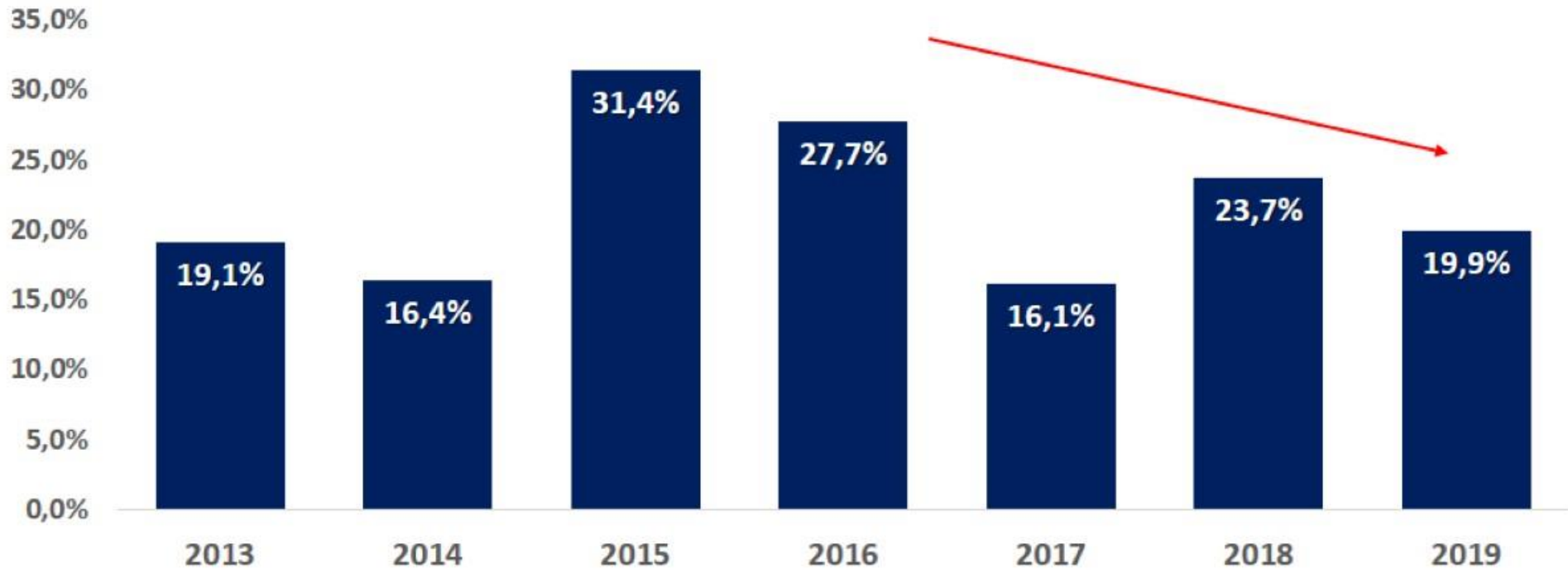
Target penerimaan pajak dalam **APBN 2019** mencapai **Rp 1577,6 T** atau tumbuh sebesar **19,9%** dari realisasi 2018

dalam Rp trilyun

No	JENIS PAJAK	REALISASI 2017	2018				APBN 2019	
			TARGET	REALISASI	Δ% 2017 - 2018	% CAPAIAN	TARGET	Δ% 2018 - 2019
A	PPh Non Migas	596,6	817,0	686,8	15,14	84,06	828,3	20,60
B	PPN & PPnBM	480,7	541,8	538,2	11,96	99,34	655,4	21,78
C	PBB	16,8	17,4	19,4	15,93	111,94	19,1	(1,53)
D	Pajak Lainnya	6,7	9,7	6,8	0,85	70,12	8,6	26,59
E	PPh Migas	50,3	38,1	64,7	28,57	169,64	66,2	2,25
Total Non PPh Migas		1.100,8	1.385,9	1.251,2	13,68	90,28	1.511,4	20,80
Total tmsk PPh Migas		1.151,1	1.424,0	1.315,9	14,33	92,41	1.577,6	19,88

djp

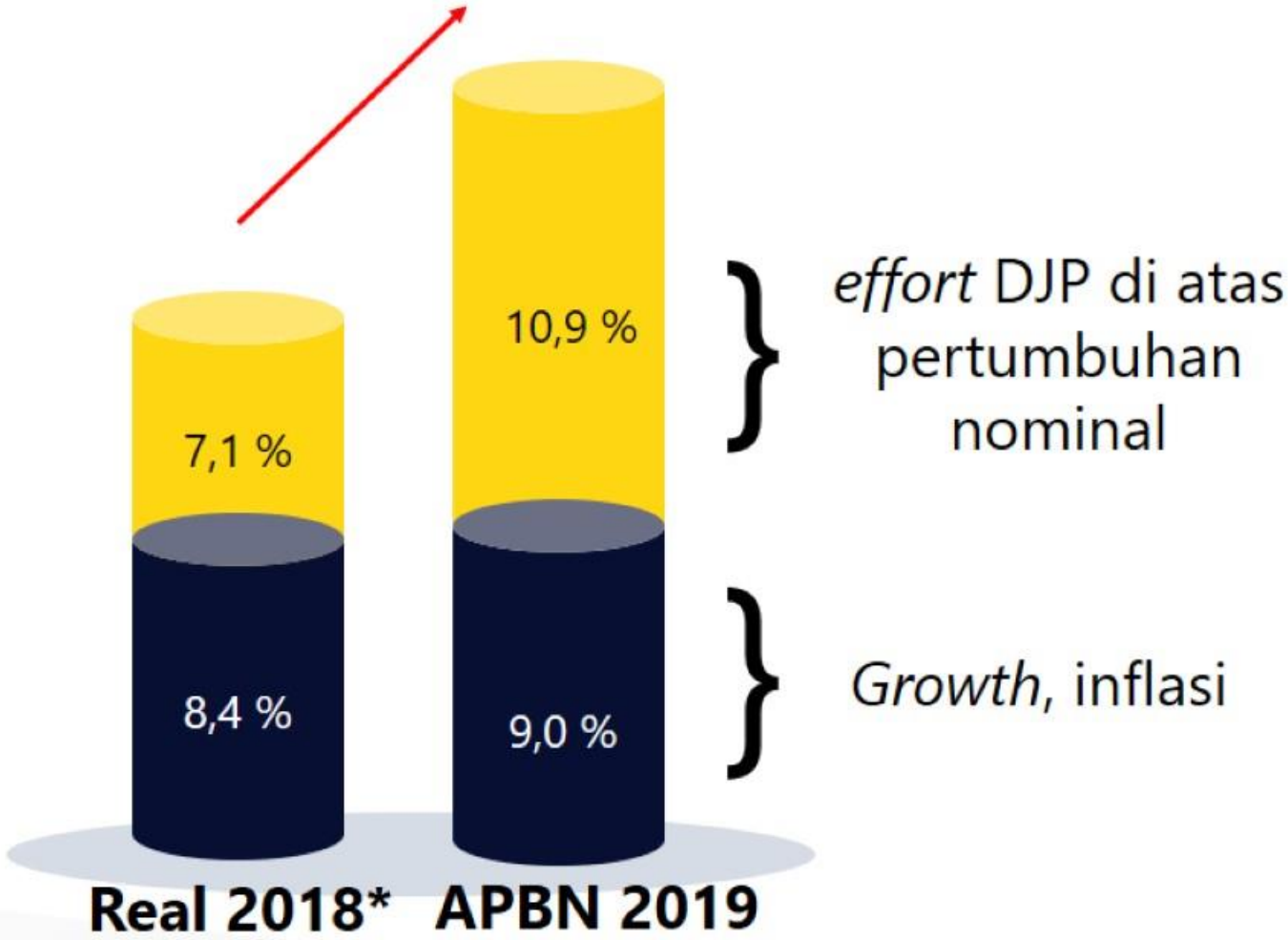
Pertumbuhan target di tahun 2019 **relatif lebih moderat**, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang **mencapai >20% (2015 – 2018)**



**pertumbuhan target 2017 di luar TA mencapai 30,6%*

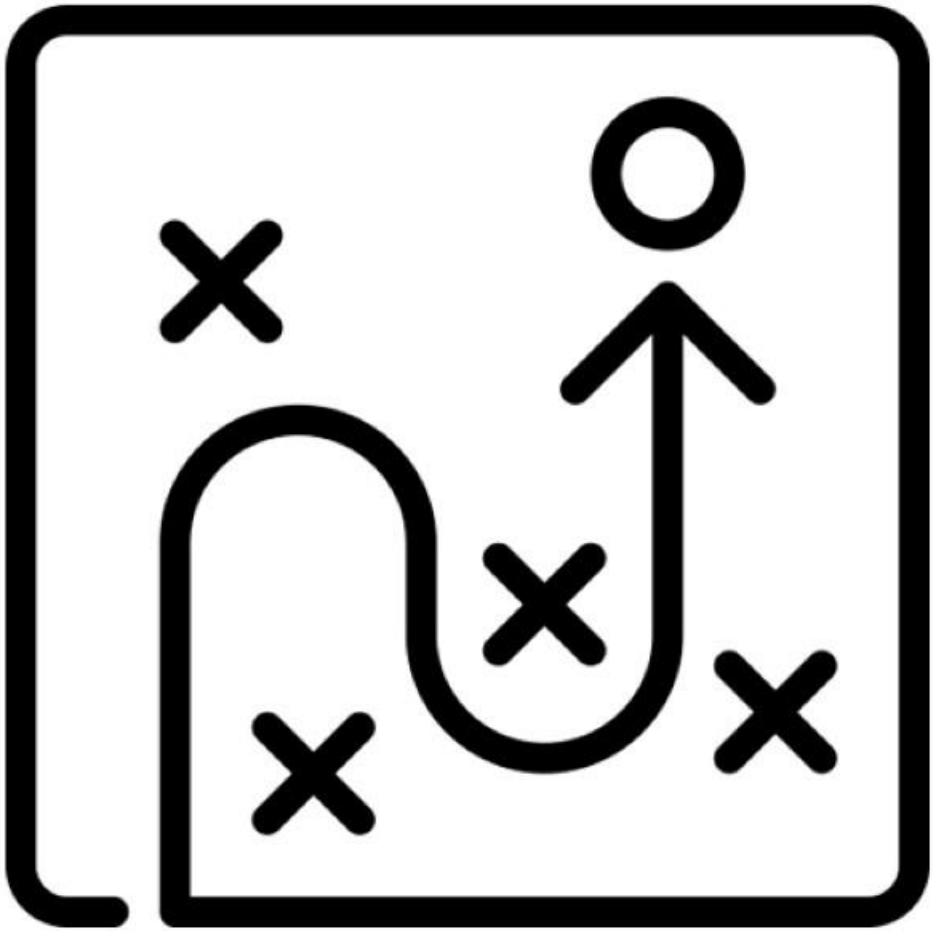
djp

Masih dibutuhkan upaya yang cukup besar di tahun 2019 untuk mencapai ***expected growth*** 19,9%



djp

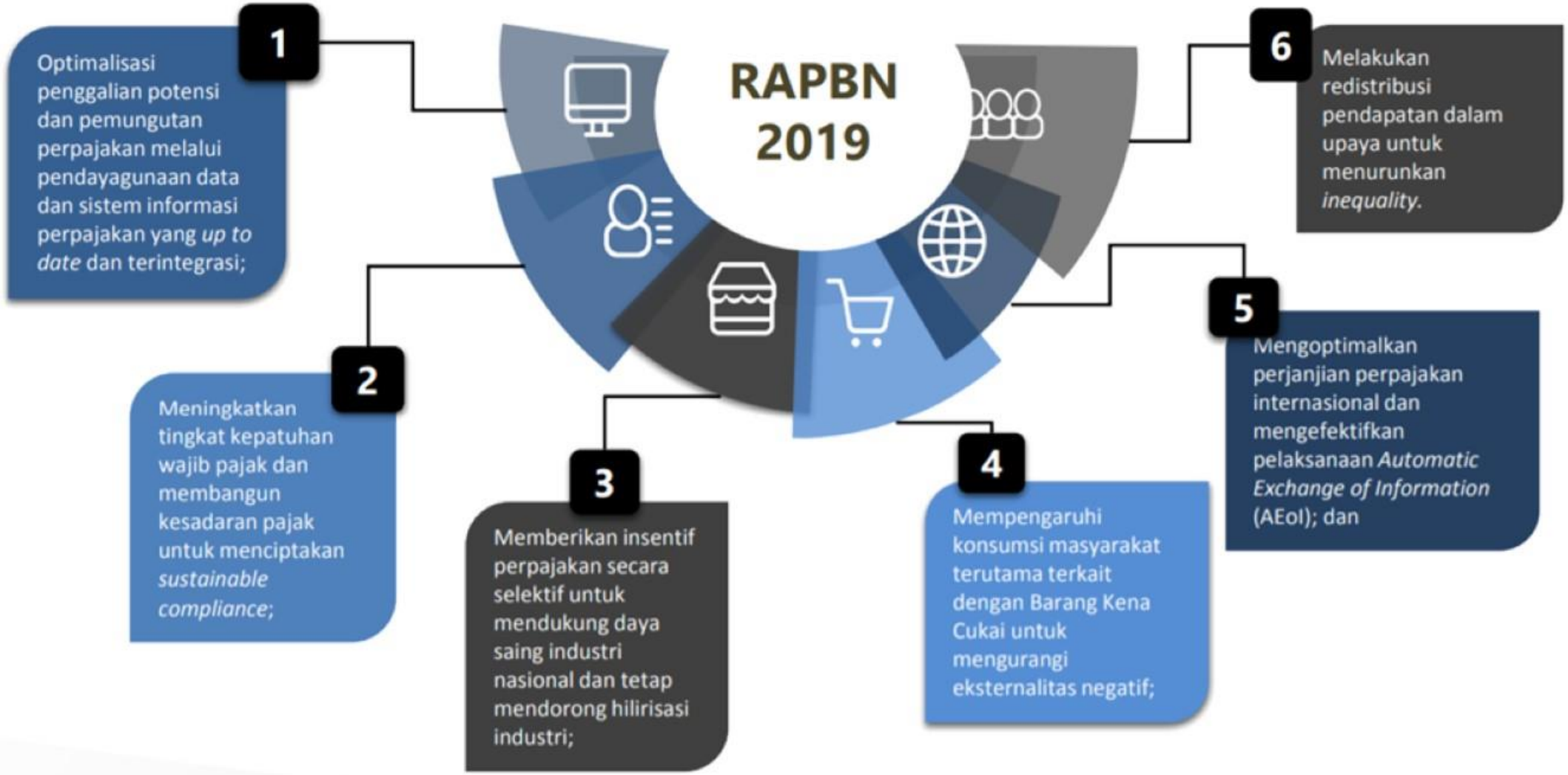
*Non-TA



Strategi Penerimaan Perpajakan

djp

Arah Kebijakan Perpajakan 2019



Fokus Kebijakan Teknis Pajak 2019

Penguatan Pelayanan Perpajakan

a. simplifikasi registrasi, perluasan tempat pemberian pelayanan
b. perluasan cakupan *e-filing*,dan
c. kemudahan restitusi

Penegakan Hukum

a. Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) secara berkeadilan
b. Peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan

Pengawasan Kepatuhan Perpajakan

a. Implementasi AEoI dan akses informasi keuangan
b. Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca *tax amnesty*
c. Penanganan UMKM *end-to-end* melalui pendekatan *Business Development Services* (BDS)
d. *Joint Program* DJP-DJBC
e. Pembenahan basis data perpajakan
f. Penerapan pengawasan Wajib Pajak berbasis risiko (*Compliance Risk Management* /CRM)

Reformasi Perpajakan

Melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, IT, maupun penyempurnaan proses bisnis.

djp

Reformasi Perpajakan

Timeline
Reformasi Perpajakan

Reformasi Undang-Undang Perpajakan
Peralihan ke sistem *Self-Assessment*
1983

Reformasi Undang-Undang Perpajakan
Penyederhanaan Jenis Pajak
1991 s.d. 2000

Reformasi Birokrasi
Penetapan Visi dan Misi serta *Blue Print*
2000 s.d. 2001

Reformasi Perpajakan Jilid I
Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Amandemen Undang-Undang Perpajakan
2002 s.d. 2008

Reformasi Perpajakan Jilid II
Peningkatan Internal Kontrol
2009 s.d. 2014

Program Amnesti Pajak
2016

Reformasi Perpajakan Jilid III
2017 s.d. 2020



Hasil yang diharapkan:
- Institusi perpajakan yang Kuat, Kredibel, dan Akuntabel untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal
- Sinergi yang optimal antar lembaga
- Kepatuhan pajak yang tinggi
- *Tax Ratio* **14%**

Reformasi Perpajakan

APA ITU
Reformasi Perpajakan

Perubahan **sistem perpajakan** yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan

Menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang **kuat, kredibel,** dan **akuntabel**

TRANSFORMASI **5 PILAR** PERPAJAKAN

ORGANISASI
Penajaman dan peningkatan fungsi, penataan dan penyempurnaan organisasi.

SUMBER DAYA MANUSIA
Pembentukan SDM yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN BASIS DATA
Penataan sistem informasi teknologi dan basis data yang andal, mendukung proses bisnis DJP, dan menghasilkan output yang akurat dan reliabel.

PROSES BISNIS
Penyederhanaan proses bisnis untuk bekerja yang lebih efektif, efisien, akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan mencakup seluruh tugas DJP.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kebijakan perpajakan yang memperluas basis perpajakan, memberikan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

www.pajak.go.id/**reformasiperpajakan**

Sekilas Reformasi Perpajakan di Indonesia

1983

- ✓ *Official-assessment system*
- ✓ terdapat 15 jenis pajak, seperti **pajak penjualan**, **pajak BDR** (bunga, dividen, royalti), **pajak pendapatan**, **pajak kekayaan**, **pajak upah**, dsb

1984

perubahan sistem secara mendasar & penyederhanaan (jenis & tarif pajak)

- ✓ perubahan ke *self-assessment system*
- ✓ UU perpajakan diganti menjadi UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU PBB, UU Bea Meterai

2002

- ✓ Modernisasi administrasi perpajakan & restrukturisasi organisasi: pembentukan kantor Modern seperti LTO (2002), Khusus (2003), KPP Madya (2004), dan KPP Pratama (2006-2008)
- ✓ Amandemen UU KUP, PPh, dan PPN
- ✓ Sunset Policy 2008

2016

- ✓ UU Tax Amnesty (2016)
- ✓ UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (2017)

**periode transisi diantaranya 1991 – 2000 (reformasi UU Perpajakan), 2000 – 2001 (cetak biru modernisasi perpajakan), 2009 – 2014 (transfromasi kelembagaan dan penguatan sistem informasi perpajakan)*

djp

Pilar Reformasi Perpajakan



Menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan data yang lebih valid komprehensif, dan terintegrasi dalam rangka **meningkatkan penerimaan pajak** jangka pendek maupun jangka panjang **yang berkesinambungan**

djp

Wajib Pajak yang telah mendapatkan TAX HOLIDAY

Sejak berlakunya PMK 35/2018 (29 Maret 2018)



12 Wajib Pajak

Industri



- Infrastruktur Ekonomi (Ketenagalistrikan) → 4 WP
- industri logam dasar hulu → 7 WP
  - ✓ Industri penggilingan baja
  - ✓ Industri besi dan baja dasar
  - ✓ industri logam dasar bukan besi
- Industri Kimia Dasar Organik → 1WP

Lokasi



- Serang, Banten → 1 WP
- Morowali, Sulawesi Tengah → 3 WP
- Kab Konawe, Sulawesi Tenggara → 1 WP
- Kab Tapanuli Selatan, Sumatera Utara → 1 WP
- Kab Halmahera Timur, Maluku Utara → 2 WP
- Kab Jepara, Jawa Tengah → 1 WP
- Bengkulu → 1 WP
- Kab Bombana, Sulawesi Tenggara → 1 WP
- Cilegon, Banten → 1 WP

Total Rencana Investasi



Rp210,8 Triliun

Negara Asal Investor



- Republik Rakyat China
- Hongkong
- Singapura
- Jepang
- Belanda
- Malaysia
- Indonesia

Penyerapan Tenaga Kerja



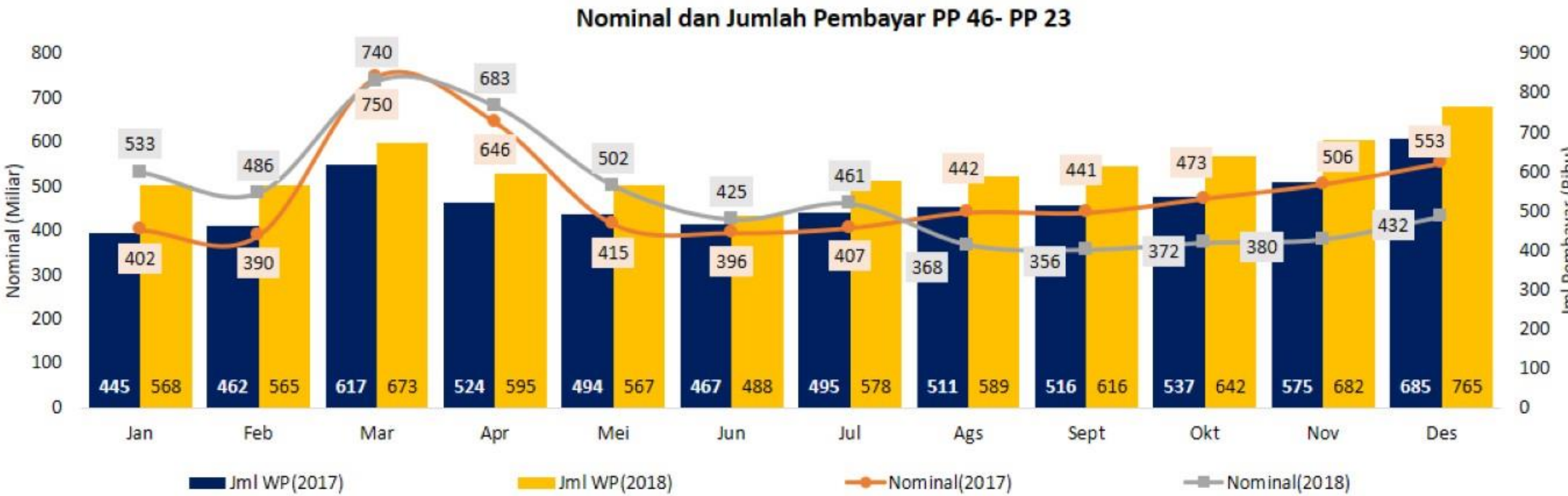
10.587 Orang

Jenis Investasi



Penanaman Modal Baru → 11WP
Perluasan Usaha → 1 WP

Perkembangan Pertumbuhan Jumlah Pembayar PP23: Secara umum tren pertumbuhan jumlah pembayar pajak positif sejak berlakunya PP 23





Sumber: Database Penerimaan diakses **31 Desember 2018** dari *Consolidated-Report (Co-Ro)*

Pembayaran PP46/ PP23 s.d. 31 Desember 2018 mencapai **5,73** triliun, dengan jumlah pembayar mencapai **1.882.825 .** Diantara pembayar tsb, sejumlah **673.374** yang baru membayar pada Agustus s.d. 31 Desember 2018 di mana pada bulan **April, Mei, Juni, dan Juli** belum pernah membayar **PP46 atau PPh 25.** Lebih lanjut, dari jumlah pembayar tersebut, sejumlah **372.675** WP baru terdaftar mulai 1 Juli 2018.

Sedangkan di tahun 2017 pembayaran PP46 mencapai **5,82** triliun, dengan jumlah pembayar mencapai **1.472.989.** Jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian penerimaan di 2018 mengalami penurunan sebesar **1,89%**, namun jumlah pembayar mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar **26%.**

djp

Peningkatan kontribusi penerimaan pajak merupakan upaya menuju **kemandirian APBN**

Namun, tetap diarahkan untuk **menjaga iklim investasi** dan **peningkatan daya saing**



#PajakKitaUntukKita

djp